

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aminuddin Ilmar, 2023, *Metode Kajian Ilmu Hukum*, Makassar: Phinatama Media.
- Asep Nurjaman, 2025, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023, *Mengawal Pemindahan Ibu Kota Negara*, Warta Pemeriksa Volume VI Edisi 7.
- Badan Pengkajian MPR RI. 2018. *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Budiman, 2021, *Manajemen Pembangunan Wilayah*, Bandung: FISIP UIN SGD PRESS.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media.
- Gazali, 2022, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Mataram: Sanabil.
- Haw. Widjaja, 2011, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Irwansyah, 2024, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2021, *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2021, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara*, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.

Maria Farida Indrati, 2007. *Pemahaman Tentang Undang-Undang Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Depok: Universitas Indonesia.

Moh. Mahfud, 1999, *Pergulatan politik dan hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.

Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, 2022, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers.

Peter van Houten, 2005, *The Internasional Politics of Autonomy Regimes*, dalam Jacobus Perviddya Soolossa, Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI, Jakarta: Sinar Harapan.

Purba, Orinton, Mas' ud Muhammadiyah, Ahmad Syamil, Afni Nooraini, Sepriano Sepriano, Sa'dianoor Sa'dianoor, dan Arifin Faqih Gunawan, 2023, *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Syaukani, Afan Gaffar & Ryaas Rasyid, 2005, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Anugrah, 2024, *Kedudukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Ismi Nur Madzidah, 2025, *Dampak Hukum Pemindahan Ibu Kota Terhadap Sistem Tata Kelola Pemerintahan di Kalimantan Timur*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

JURNAL

Anastasius, Y. and Widyaningrum, W., 2023. *Implikasi Dualisme Status Otorita Ibukota Nusantara dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara*, UNES Law Review Volume 6 Nomor 2.

Aziz SR, Abdul, 2023, *Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Civil society*, Journal of Politics and Policy Volume 5 Nomor 2, hlm. 104-118.

Faiz, P. M., 2017, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hal 135-149.

Fernanda, M., Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti, 2023. *"Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik"*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Volume 7, No. 3.

- Hidayat, Andi Rahmat, Otto Hospes, dan C. J. A. M. Termeer. 2025. *"Why Democratization and Decentralization in Indonesia Have Mixed Results on the Ground: A Systematic Literature Review"*. *Public Administration and Development* Volume 45, Nomor 1, hlm.159-172.
- Latuny, J.A., Salmon, H., Mustamu, J., 2024, *Interpretasi Hukum Mutatis Mutandis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, PAMALI: Pattimura Magister Law Review, Volume 4 Nomor 2, hlm.100-115.
- Leanosa, L., Chofa, F. dan Gusman, E., 2024, "Pengelolaan tanah sebagai aset daerah Kota Bukittinggi dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara daerah", *Otentik Law Journal* Volume 2 Nomor 1, hlm.1-15.
- Nainggolan, Poltak Partogi, Riris Katharina, Pihri Buhaerah, Aninda Wisaksanti Rudiastuti, dan Tini Apriani, 2025, *Questioning Governance Model for Indonesia's New Capital*, In *Relocating Indonesia's Capital City: The Struggle for Power and Resources in Borneo*, hlm.103-116.
- Naue, A.P.P., Putranto, A.C. dan Triadi, I., 2025, "Peran Pengawasan Internal dalam Menemukan dan Mencegah Kerugian Keuangan Negara Perspektif Penemuan Hukum di Indonesia dan Negara ASEAN", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Volume 3 Nomor 6, hlm.9381-9407.
- Nasoha, A.M.M., Atqiya, A.N., Khoiroh, Z.J. and Putri, R.D.A., 2025, *Relevansi Konstitusionalisme dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 2 Nomor 3, hlm.202-215.
- Purba, B., Sihombing, A. E., Azizah, L. N., & Purba, A. A., 2024, *Analisis Penerapan serta Hambatan Pemikiran Tokoh-tokoh Ekonomi Klasik terhadap Sistem Ekonomi Masa Kini*, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Volume 4 Nomor 3, hlm.148–159.
- Putra, H.C. dan Kandar, I., 2022, "Konsep Pengelolaan Keuangan Negara Dan Barang-Barang Publik", *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)* Volume 2 Nomor 2, hlm.57-73.
- Rizki Nurdin, 2022, *Desentralisasi dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara*, *Lex Renaissance* Volume 7 Nomor 3, hlm.617-633.
- Safitri, W. E., Riyadi, S., & Ferianto, F., 2024, *Akuntabilitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Desa Wanamukti Barat*

Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, JPS: Journal of Publicness Studies Volume 01 Nomor 01, hlm.12–17.

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, 2019, *Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara*, Info Singkat Volume 11 Nomor 16, hlm.19-22.

Sembiring, F.Y., 2023. *Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*, Lex Privatum Volume 11 Nomor 4.

Sondakh, Jemmy, Kurnia Gracella Lumingkewas, Dani Robert Pinasang, 2023, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara*, Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3, hlm. 3132-3139.

Ulfa, Mutia, 2024, *Analisis Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dalam Proyek IKN Nusantara*, Economics and Digital Business Review Volume 5 Nomor 1, hlm. 387-393.

INTERNET

Deipenbrock, Gudula, *What Is Legal Complexity in Corporate Law?*, Oxford Business Law Blog, 1 Juli 2025, blogs.law.ox.ac.uk/oblb/blog-post/2025/07/what-legal-complexity-corporate-law.

Riva Pansa Angga, 2023, *Instrumen dan Fasilitas Pendukung Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur*, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/REGULASI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Aset Dalam Penguasaan (ADP) di Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2022 Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIV/2016